DAFTAR PUSTAKA

A. **BUKU**

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 1–3, 47.

Aditama, Tjandra Yoga, Manajemen Rumah Sakit, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2002), hlm.72.

Amin, S., Pengantar Psikologi Umum, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2014), hlm. 6.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 118, 123.

Asyhadie, Z., Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 21–22.

Azwar, Azrul, Pengantar Hukum Administrasi Kesehatan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1988), hlm. 1.

Brazier, Margaret dan Emma Cave, Medicine, Patients and the Law, Edisi ke-4, (London: Penguin Group, 2007), hlm. 69.

Chong, R. L., The Right to Health, (Lisbon, Portugal: Servir, 1986), hlm. 9.

Daulay, N., Pengantar Psikologi dan Pandangan Al-Qur'an tentang Psikologi, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 44.

Dewi, A. I., Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hlm. 166.

Endipradja, Firman Turmantara, Hukum Perlindungan Konsumen: Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 10, 25.

Fahmi, Irham, Manajemen: Teori, Kasus, dan Solusi, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 2.

Fajar Nur Dewata, Mukti dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 47.

Friedman, Lawrence M., American Law: An Introduction, Edisi ke-2, penerjemah Wishnu Basuki, (Jakarta: Tetanusa, 2001), hlm. 8–10, 60, 63.

Friedman, Lawrence M., The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

Fuady, Munir, Sumpah Hippocrates: Aspek Hukum Malpraktek Dokter, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 48.

Guwandi, J., Dokter, Pasien dan Hukum, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2004), hlm. 13.

Guwandi, J., Dugaan Malpraktik Medik dan Draft RPP: "Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien", (Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2006), hlm. 14.

Guwandi, J., Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2011), hlm. 35–38.

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan

Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–3, 84–90.

Hadjon, Philipus M., et al., Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993),hlm 25.

Halili, Hak Asasi Manusia: Dari Teori ke Pedagogi, (Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 8.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 64.

Hartono, S.S., Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda, Bagian Umum, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 89.

Hasibuan, Malayu, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 77.

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 152.

Hernoko, A. Y., Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 21.

Hestu, C. B., Hukum Tata Negara Indonesia, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), hlm. 20.

Indrayathi, P. A., Sistem Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di Thailand, 2016, hlm. 245.

Isfandyarie, A., Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 3.

Ismail Solihin, Pengantar Manajemen, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

Jazim H., Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Malang: Alumni, 2009), hlm. 9.

Kelsen, Hans, Pengantar Teori Hukum Murni, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 38.

Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, translated by Max Knight, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 221.

Kertonegoro, Sistem Jaminan Sosial dan Pembiayaan Pensiun di Indonesia, 1998.hlm. 24

Kertonegoro, Sistem dan Program Jaminan Sosial di Negara-negara ASEAN, (Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1998), hlm. 19, 35.

Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Kedokteran, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 92.

Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Kedokteran, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 87.

Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum untuk Perumahsakitan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 65, 188.

Komalawati, Veronica, Hukum dan Etika dalam Praktik Kedokteran, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 77.

Komalawati, Veronica, Hukum dan Etika Praktik Kedokteran, (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 45.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 13.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 123.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 123–124.

Kusnardi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, 1983), hlm. 153.

Kusumaatmadja, Mochtar dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 137–139.

Latif, Yudi, Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 49, 50.

Lementa, Benyamin, Pasien: Citra, Peran dan Perilaku, Tinjauan Fenomena Sosial, Cet. I, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), hlm. 81.

Lubis, Suhrawardi K, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

Lumenta, B., Pasien, Citra, Peran dan Perilaku, (Jakarta: Kanisius, 1989), hlm. 15, 81.

Luthans, Fred, Organizational Behavior, (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 283.

Mahfud MD, Moh., Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 1–2.

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 171.

Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 3.

Mertokusumo, Sudikno, MengenalHukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 33, 40–43.

Mertokusumo, Sudikno, MengenalHukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 40.

Moerdiono P. S., Pancasila sebagai Ideologi Terbuka, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), hlm. 163.

Moleong, Lexy J., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 48.

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021),hlm. 6.

Musakkir, Putusan Hakim yang Diskriminatif dalam Perkara Pidana: Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2013), hlm. 48, 52-57.

Nasution, A. H., Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 31–35.

Nasution, A. H., Ini Konsensus Nasional 1966: Laksanakan UUD Negara RI Tahun 1945 Secara Murni dan Konsekuen, (Jakarta: Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, 1981), hlm. 3.

Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Daya Widya, 1999), hlm. 13.

Nasution, Az., Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2006), hlm. 20–22.

Nasution, Az., Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia, (Jakarta: BPHN, 1993), hlm. 1, 6, 18, 23.

Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, Cet. I, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 27–34.

Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan: Pertanggungjawaban Dokter, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 56.

Nasution, Bahder Johan, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 110.

Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafat Negara, (Jakarta: Bina Aksara, 1974), hlm. 60.

Notoatmodjo, Soekidjo, Etika dan Hukum Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 44, 61, 154.

Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan, Edisi ke-2, (Jakarta: Salemba Medika, 2011), hlm. 45.

Praja, Juhaya S., Teori Hukum dan Aplikasinya, Cet. II, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 53, 60.

Praptianingsih, S., Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 25.

Prasetyo, Teguh, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 92–97.

Putri, Endang A., Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), (Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung, 2014), hlm. 7.

Rahayu, Ani Sri, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 9.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–15.

Rahardjo, Satjipto, Hukum dalam Perspektif Masyarakat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 45.

Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 1–7.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 353.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 45.

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 352.

Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hlm. 10–11.

Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 9–18.

Rahardjo, Satjipto, Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya, (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 100.

Rahmayanty, N., Manajemen Pelayanan Prima, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 24.

Rakhmat, Jalaluddin dan Idi Subandy Ibrahim, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik dan Penafsirannya, Edisi Revisi Kedua, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2016), hlm. 29.

Ranawijaya, Usep, Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 181.

Robbins, Stephen P., Organizational Behavior, Edisi ke-16, (Pearson, 2015), hlm. 36.

Sadi Is, Muhamad, Etika dan Hukum Kesehatan: Teori dan Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 29.

Santoso, M. Agus, Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 85.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 9.

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. II, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 12.

Siagian, Sondang P., Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 15.

Siagian, Sondang P., Administrasi Publik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 41.

Siagian, Sondang P., Filsafat Administrasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 67. Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 23.

Sirajuddin, Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi, (Malang: Setara Press, 2012), hlm. 78.

Siswati, Etika dan Hukum Kesehatan dalam PerspektifUndang-Undang Kesehatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 11.

Sjahdeini, Sutan Remy, Hukum Kesehatan tentang Hukum Malapraktik Tenaga Medis, (Bogor: IPB Press, 2020), hlm. 46.

Sjahdeini, Sutan Remy, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit, (Jakarta: Grafiti, 2015), hlm. 112.

Soediman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 67.

Soekanto, S. dan Muhamad K., Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia, (Jakarta: Grafitti Press, 1983), hlm. 2.

Soewondo, Slamet Sampurno, Fungsi Tenaga Medis Asing di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan, 2007, hlm. 65.

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT Intermasa, 2002), hlm. 45.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2, Cet. ke-29, (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 9, 49–51.

Suhrawardi, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 50.

Sutedi, Adrian, Tanggung Jawab Produk dalam Perlindungan Konsumen, Cet. I, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 9, 135.

Sutoyo, Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 20.

Suryadi, T., Prinsip-Prinsip Etika dan Hukum dalam Profesi Kedokteran, (Banda Aceh: Tim Bioetika dan Humaniora FK Unsyiah, 2009), hlm. 4.

Ta'adi, Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi bagi Perawat, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2013), hlm. 5.

Taniredja, T. dan Suyahmo, Pancasila Dasar Negara Paripurna, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2020), hlm. 54.

Thabrany, Hasbullah, Jaminan Kesehatan Nasional, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 24–25.

Triwibowo, C., Etika dan Hukum Kesehatan, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), hlm. 16.

Triwulan Tutik, Titik dan Shita Febriana, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hlm. 12, 27–28.

Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar Harapan, 1989), hlm. 9.

Wiasa, I Nyoman Dharma, Jaminan Kesehatan Nasional, hlm. 28.

Yustina, Endang Wahyati, Hukum Kesehatan dan Malpraktik Medik, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 112.

Yustina, Endang Wahyati, Mengenal Hukum Rumah Sakit, (Bandung: Keni Media, 2012), hlm. 15.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 135.

B. **MAKALAH DAN ARTIKEL ILMIAH**

Aarons, L. dan G. Rona, "State Responsibility to Respect, Protect and Fulfill Human Rights Obligations in Cyberspace," Journal of National Security & Policy, Vol. 8, (2016), hlm. 503–530.

Abdurkhman, R. N. dan M. A. Maulana, "Psikoreligius terhadap Perubahan Persepsi Sensorik pada Pasien Halusinasi Pendengaran di RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon," Jurnal Education and Development, Vol. 10, No. 1, (2022), hlm. 251–254.

Andersen, R. M., P. L. Davidson, dan S. E. Baumeister, “Improving Access to Care in America: Individual and ContextualIndicators,” dalam Changing the U.S. Health Care System, (2013), hlm. 33–69.

Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif oleh Hakim untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi,” Kosmik Hukum, Vol. 18, No. 1, (2018).

Deloitte, “The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path Forward,” Deloitte Insights, 2020, hlm. 6.

Evans, “Strategic Human Resource Management: People and Performance,” London: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), 2003, hlm. 73.

Febriansyah, “Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa,” DIH: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 25, (2017), hlm. 6.

Frenk, Julio, “The Global Health System: Strengthening National Health Systems as the Next Step for Global Progress,” PLoS Medicine, Vol. 7, No. 1, (2010), hlm. 10.

Futuready, “Rumah Sakit Bertaraf Internasional dengan Fasilitas Modern,” 2016, hlm. 30.

Gita Kartika, Adijaya Yusuf, dan Hadi Rahmat Purnama, “Penerapan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) mengenai Hak Atas Kesehatan di Indonesia,” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, (2009), hlm. 8–10.

Gunawan, J., “Product Liability dalam Hukum Bisnis Indonesia,” Pro Justitia, Tahun XII, No. 2, (1994), hlm. 7.

Gunawan, Johannes, "Tinjauan Umum dan Kritis terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen," Makalah disampaikan pada Pertemuan Nasional Organisasi Konsumen yang diselenggarakan oleh YLKI, Bogor, 20–25 September 1999, hlm. 10.

Hans Lura, "Konsep Keadilan dalam Pancasila (Analisis Reflektif terhadap Pemikiran Thobias A. Messakh)," KINAA: Jurnal Teologi, Vol. 3, No. 2, (2018), hlm. 1–14.

Hunt, Paul, "Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based Approach to Health," Health and Human Rights, Vol. 18, No. 2, (2016), hlm. 109– 130.

Jenie, Siti Ismijati, "Rekam Medis sebagai Alat Bukti dalam Sengketa Medik," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49, No. 1, (2019), hlm. 78–80.

Julita, "Menuju Kepuasan Pelanggan Melalui Penciptaan Kualitas Pelayanan," Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 1, No. 1, (Oktober 2001), hlm. 3.

Kruk, Margaret E., dkk., "High-Quality Health Systems in the Sustainable Development Goals Era: Time for a Revolution," The Lancet, Vol. 392, No. 10160, (2018), hlm. 2451–2460.

Lemhannas RI, Pokja Ideologi, Modul Bidang Studi/Materi Pokok Pancasila dan Perkembangannya, PPRA XLVIII, 2012, hlm. 25.

Mansyur, M. Ali, "Pertanggungjawaban Rumah Sakit terhadap Kerugian Pasien," Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, Vol. 5, No. 2, (2018), hlm. 45–47.

Nugraheni, Wulan P. dan R. K. Hartono, “Tantangan Sistem Rujukan dalam Pelayanan Kesehatan Nasional,” Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 20, No. 3, (2017), hlm. 123–131.

Nuryaasiinta, Cut Mayang Widya, “Perlindungan Konsumen bagi Pasien Selaku Pemanfaat Pelayanan Medis,” Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 21, No. 1, (April 2019), hlm. 77–92.

Organisation of Islamic Cooperation (OIC), Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990.

Parasuraman, A., V. A. Zeithaml, dan L. L. Berry, “SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality,” Journal of Retailing, Vol. 64, No. 1, (1988), hlm. 23.

Probowati, Y., “Peran Psikologi dalam Investigasi Kasus Tindak Pidana,” Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, Vol. 1, (2008), hlm. 26–27.

Ufran, “Penegakan Hukumdalam PerspektifHukum Progresif,” Perspektif Hukum, Vol. 19, No. 2, (November 2019), hlm. 201–213.

Viviansari, D. B., “Tanggung Jawab Negara terhadap Hak Atas Pendidikan Anak Buruh Migran Indonesia,” No. 3, (2019), hlm. 179–194.

WHO dan OHCHR, The Right to Health: Fact Sheet No. 31, 2008, hlm. 9.

World Health Organization, Integrated Health Services: What and Why?, Technical Brief No. 1, Geneva: World Health Organization, 2008, hlm. 1–2.

World Health Organization, Monitoring the Building Blocks of Health Systems: A Handbook of Indicators and Their Measurement Strategies, Geneva: World Health Organization, 2010, hlm. 1–2.

World Health Organization, Pocket Book of Hospital Care for Children, Edisi ke-2, Geneva: WHO Press, 2013.

World Health Organization, The Right to Health, Geneva: World Health Organization, 2008, hlm. 1–3.

World Health Organization, The World Health Report 2000: Health Systems—Improving Performance, Geneva: World Health Organization, 2000, hlm. 5–6.

Yudithia, S., "Perlindungan Hukum terhadap Peserta BPJS Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit," Pactum Law Journal, Vol. 1, No. 2, (2018), hlm. 164–169.

Yustina, E. W., Esem O., dan Siregar R. A., "Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa," Jurnal Kedokteran Indonesia, Vol. 6, No. 1, (2020), hlm. 10.

Zaini Abdillah, Elli Ruslina, Miliani Azalia, Ni Kadek Ayu Pramulita, dan Andri Wiguna, "Harmonization of Health Law Number 17 of 2023 with the Legal Status of Hospitals as Legal Entities," Jurnal Smart Hukum (JSH), Vol. 3, No. 3, (2025), hlm. 246.

BPJS Kesehatan, "Asas, Tujuan, dan Prinsip BPJS Kesehatan," JKN Jamsos Indonesia, diakses 13 September 2025.

BPJS Kesehatan, "Data Business Intelligence BPJS Kesehatan per 1 Desember 2024," Jakarta: BPJS Kesehatan, 2024.

BPJS Kesehatan, "Dorong Optimalisasi Peran Faskes Primer dalam Gerakan Promotif-Preventif," Jakarta: BPJS Kesehatan, 2018, hlm. 5.

BPJS Kesehatan, “Pedoman Umum Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) BPJS Kesehatan,” Jakarta: BPJS Kesehatan, 2014, hlm. 15.

BPJS Kesehatan, “Profil BPJS Kesehatan,” Jakarta: BPJS Kesehatan, 2014.

BPJS Kesehatan, “Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia,” Jakarta: BPJS Kesehatan, 2020, diakses 25 Agustus 2025.

BPJS Kesehatan, Laporan Kinerja BPJS Kesehatan, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2021.

BPJS Kesehatan, Portal Data JKN, Jakarta: BPJS Kesehatan, 2025, diakses 16 Juli 2025.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Dasar Hukum Jaminan Kesehatan.”

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, hlm 14.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Sistem Rujukan Nasional, Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Jakarta, 2012, hlm. 25.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Profil Kesehatan Indonesia 2021, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2015–2019, Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017, hlm. 35–40.

Ombudsman Republik Indonesia, “Pembatasan Layanan Pasien BPJS Kesehatan Diskriminatif,” Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia, diakses 16 Juli 2025.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, “Viral Penolakan Pasien BPJS Kesehatan, Ombudsman Kepri Sidak RSUD Embung Fatimah,” Siaran Pers Nomor B/012/HM.04-05/VI/2025, 18 Juni 2025.

Yudi Latif, “Pancasila Rumah Kita,” Naskah Pidato Politik di Taman Ismail Marzuki, 31 Mei 2011, hlm. 46-47.

C. **KAMUS**

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Pasien,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses 16 Juli 2025.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Perlindungan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring.

D. **DISERTASI**

Anjaryani, W. D., Kepuasan Pasien Rawat Inap terhadap Pelayanan Perawat di RSUD Tugurejo Semarang, (Tesis, Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 40.

E. **PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Indonesia, Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456.

Konsil Kedokteran Indonesia, Putusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, (Jakarta, 2019).